

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan sejarah (historiografi) merupakan fase atau langkah yang dilakukan setelah Heuristik dan sumber sejarah yang biasa dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah memasuki langkah-langkah yaitu penafsiran dan pengelompokan fakta-fakta dalam berbagai hubungan mereka yang dalam bahasa Jerman disebut Auffassung serta formulasi dan persentase hasil-hasilnya yang dalam bahasa Jerman disebut Darstellung (Helius Sjamsuddin 2007:155).

Kata demokrasi selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sipil apalagi di kalangan politisi serta menjadi konsumsi publik sehari-hari di negeri ini. Disamping itu, demokrasi seolah-olah tidak lagi menjadi hal yang ambigu, apalagi karena demokrasi melalui reformasi 1998 dibuka seluas-luasnya dan siapa pun bisa mengakses untuk mengamati dan terjun langsung didalamnya. Dalam perjalanan sejarah bangsa, demokrasi sebenarnya telah lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam perjalanannya kemudian demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan tujuannya, serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan – kekuatan yang anti demokrasi.

Demokrasi adalah pemerintahan semua buat semua. Semua warganegara : ikut dalam proses pembuatan kebijakan negara dan dalam pengawasan kerja semua

lembaga negara. Demokrasi bukan sekedar pemerintahan oleh mayoritas, apakah mayoritas permanen, yaitu mayoritas karena ciri permanen seperti ras, suku, dan agama atau mayoritas karena menang pemilihan umum. Demokrasi adalah pemerintahan seluruh rakyat, termasuk kaum lemah, miskin dan marginal lainnya. Semua warganegara ikut memerintah, dengan kewajiban dan hak yang sama. Pemenang dalam pemilihan umum memerintah, dan yang kalah mengawasi jalannya pemerintahan sembari mengkampanyekan kebijakan alternatif.

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Rakyat secara bersama – sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari antara mereka menjadi penyelenggara negara, dengan tugas melayani seluruh rakyat sesuai dengan kehendak rakyat (Merphin Panjaitan, 2013 : 1).

Demokrasi adalah gabungan antara dan tujuan. Berbeda dengan pemerintahan diktator yang memisahkan tujuan dengan cara. Segala cara bisa ditempuh demi pencapaian tujuan. Demokrasi memang bukan pemerintahan yang efisiensi, tetapi pemerintahan demi tanggung jawab, dan oleh karena itu pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Tetapi sekali keputusan menjadi lebih lambat. Tetapi sekali keputusan ditetapkan, dapat diharapkan masyarakat luas akan mendukung pelaksanaannya. Demokrasi mengambil keputusan dengan dialog, mufakat atau voting. Melalui diskusi dan debat publik, setiap pihak berusaha meyakinkan pihak lain dengan menggunakan logika dan fakta. Bisa jadi kemudian dapat diambil keputusan melalui kompromi, dan kalau kompromi gagal dapat ditempuh voting. Tetapi kalau satu keputusan tidak perlu segera diambil, pengambilan keputusan dapat saja ditunda (Merphin Panjaitan, 2013 : 3).

Demokrasi telah berlangsung cukup lama, dan dalam perjalanannya mengalami masa pasang – surut. Di Yunani kuno sekitar 2500 tahun yang lalu, demokrasi tumbuh dan berkembang, tetapi kemudian mati. Bagi Indonesia dan bagi banyak negara lainnya, demokrasi adalah pilhan, oleh karena demokrasi adalah tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia. Demokrasi menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Demokrasi mengakui bahwa manusia dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama. Tatanan pemerintahan negara yang lain tidak mengetahui kesetaraan manusia, bahkan dengan jelas menyatakan bahwa martabat manusia itu berbeda-beda. Ada manusia dengan martabat “tuan” dan ada masyarakat biasa harus menerimanya dengan ucapan terima kasih.

Pada tahun 1999 pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik, dan kemudian Abdulrahman Wahid terpilih menjadi Presiden dan Mega Wati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden disidang Paripurna MPR RI. Pemilihan umum 2004 diikuti oleh 24 Partai politik dan selanjutnya Susilo Bambang Yudoyono terpilih menjadi Presiden dan Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden secara langsung. Pemilihan Umum 2009 menghasilkan 560 orang anggota DPR dan Susilo Bambang Yudoyono terpilih kembali menjadi Presiden dan Budiono menjadi Wakil Presiden. Pemilihan Umum 1999, 2004, dan 2009 adalah pemilihan umum yang demokratis, berlangsung bebas, adil, kompetitif dan berkala. Selain itu Gubernur, Bupati dan Walikota sejak beberapa tahun terakhir ini juga telah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum kepala daerah di wilayahnya masing – masing.

Sebelum era reformasi, demokrasi adalah sebuah impian. Ketika itu, di bawah kekuasaan yang terpusat dan membelenggu, kita menginginkan kebebasan untuk

berekspresi, ikut menentukan jalannya pemerintahan, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Kita memimpikan pemerintahan yang dibentuk atas dasar pilihan rakyat dan berbuat untuk kemaslahatan rakyat. Kita menginginkan demokrasi dan sebuah republik yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan sistem yang dipilih oleh pendiri bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Inti dari demokrasi adalah pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada ditangan rakyat. Manifestasi tertinggi prinsip kedaulatan rakyat adalah konstitusi karena merupakan hasil perjanjian seluruh rakyat.

Demokrasi tidak hanya sekedar sebagai prosedur, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan berjalannya pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai normativitas aturan dan keputusan hukum, melainkan yang lebih penting adalah kesesuaian dan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak. Demokrasi tidak dapat ditinggalkan, apalagi melanggar hak konstitusional warga negara. Karena demokrasi sejatinya berdiri di atas prinsip pengakuan kewarganegaraan dengan segala haknya sebagai warga. Dengan sendirinya, bukan demokrasi namanya jika dalam pelaksanaan terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warganegara.

Bangsa ini tentu sudah sangat dewasa untuk memahami bahwa realitas demokrasi saat ini belum merupakan demokrasi sejati yang dicita – citakan. Paling tidak, inilah yang tercermin dari pelaksanaan demokrasi lokal melalui pemilihan umum kepada daerah (pemilukada), terutama dari perkara sengketa pemilukada yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik pemilukada hanya menampilkan jasad demokrasi. Ruh

demokrasi tidak bisa disandera dan disabotase oleh berbagai bentuk pelanggaran, keberpihakkan, politik uang, dan bahkan intimidasi.

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang – surut sejak lahirnya republik ini hingga sekarang. Secara singkat pasang – surut demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan tingkah laku para elitnya, apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggungjawab. Sikap miopik dan parokial ini terutama bersumber pada kondisi lemahnya kultur ke–negarawanan yang diindap sebagian besar politisi di Indonesia. Indonesia termasuk sebagai bangsa yang beruntung karena sejak awal mayoritas layaknya telah memilih sistem demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir. Penduduknya yang mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya (founding fathers). Kenyataan ini merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih secara bertanggung jawab. Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin negeri ini dalam berpolitik. Upaya perbaikan sistem ini harus dilakukan terus – menerus tanpa merasa bosan, sekalipun pada hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan.

Ganderang reformasi yang ditabuh mahasiswa dan berbagai element bangsa pada 1998 adalah perjuangan melepas kekuatan otoriter Orde Baru. Barisan pemuda, khususnya mahasiswa kala itu, merapatkan barisan dalam aksi demonstrasi menentan pemerintah, bahkan kemudian menggulirkannya. Salah satu Akbar Tandjung yang mengimplementasikan lewat partai politik Akbar Tandjung menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) melalui kendaraan politik Golong Karya (GOLKAR) yang notabeni-nya partai penguasa di era Orde Baru.

Menurut Evendhy Siregar, 2002:115 banyak kalangan, terpilihnya Akbar Tandjung pada Munas Luar Biasa (MLB) Golkar, 9 – 11 juli 1998 di Jakarta sebagai ketua umum periode 1998 – 2003, telah membawa fenomena baru, karena pemilihan itu yang paling demokratis sejak berdirinya Golkar/Sekber Golkar, 20 Oktober 1964. Sebab untuk dapat menjadi ketua umum DPP Golkar di Munas itu diadakan lewat pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Tiga dekade ketua umum Golkar sebelumnya, dipilih secara aklamasi berdasarkan petunjuk H.M. Soeharto (Pak Harto) yang memegang kendali Golkar sesungguhnya melalui lembaga Ketua Dewan Pembina. Sehingga ada yang berpendapat, suara Pak Harto adalah suara Golkar, dan suara Golkar adalah suara Pak Harto.

Meski berpengalaman sebagai Ketua Umum HMI, KNPI, Wakil Sekjen Golkar, dan pernah empat periode menjabat menteri, tak sedikit yang meragukan ketangguhannya. Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat saat ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan lapang dada atas kekalahannya sekalipun banyak cara dan jalan menuju demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu konstitusi politik merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak akademi plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang terhormat. Hal semacam ini terasa tidak

asing lagi jika kita melihat fenomena yang mewarnai pentas politik nasional, yaitu dengan maraknya kampanye yang mereka lakukan dalam bentuk aksi massa maupun melalui media, dengan menyuarakan pandangan politik mereka terhadap isu – isu aktual dengan senantiasa menyisipkan isu tentang pendirian negara islam sebagai solusi paling manjur atas promblematika kebangsaan. Ditambah lagi dengan semakin menghangatkan permasalahan terorisme dengan segala tafsir dan perdebatan yang dari tahun semakin menemukan tempatnya dalam peta politik nasional maupun internasional.

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik nilai – nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesia kearah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apa yang kemudian dijadikan dasar gerakan politik. Bagaimana sebenarnya pemaknaan demokrasi Pancasila di Indonesia itu sendiri.

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika persoalan politik pada tema – tema besar. Maka penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran terhadap tokoh yang memiliki basis historis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu, penulis memilih seorang tokoh yang bernama Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR – RI periode 1999 – 2004). Sebagai intelektual muda dan sebagai tokoh politik nasional Akbar Tandjung banyak memiliki gagasan yang brilian di bidang politik dan demokrasi. Hal ini bisa di maklumi tidak semata – mata karena Akbar Tandjung intens dalam pergulatan di pentas politik nasional dan pernah memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia yaitu Mantan Ketua Umum GOLKAR. Disamping itu, sosok ini

juga mengalami proses panjang dalam pergulatan intelektual dan sangat intelektual dan sangat produktif dalam menorehkan gagasan – gagasan baru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan demokrasi pancasila dalam wanaca politik Indonesia.
2. Seorang tokoh Mantan Ketua DPR – RI Periode 1999 – 2004 dan juga Mantan Ketua Umum GOLKAR yang banyak memiliki gagasan dan pemikiran tokoh politisi ini mengenai demokrasi Indonesia. Bagaimana konsep Demokrasi pancasila di mata Akbar Tandjung.
3. Bagaimana keberlangsungan sistem demokrasi Indonesia, telah berlangsung dengan baik.

C. Rumusan masalah

Sebagaimana yang ada di pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaiman pemaknaan demokrasi pancasila dalam wacana politik Indonesia menurut Akbar Tandjung?
- 2) Bagaimana konsep demokrasi pancasila Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung?
- 3) Bagaimana dalam pemikiran Akbar Tandjung mengenai keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik?

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan dan menelusuri pemikiran Akbar Tandjung tentang demokrasi pancasila dalam wacana politik Indonesia.
- 2) Menjelaskan implikasi dari pemikiran politik Akbar Tandjung dalam merumuskan konsep demokrasi.
- 3) Mendeskripsikan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dalam pemikiran Akbar Tandjung.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian, sehingga yang menjadi manfaat penelitian yaitu :

- 1) Manfaat secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam domain demokrasi dan negara.
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang demokrasi di Indonesia.
- 3) Menjadi pedoman dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian yang sama.
- 4) Bagi UNIMED, menambah perbendaharaan penulisan karya ilmiah.
- 5) Bagi peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.